

**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE*  
(ICG) TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN  
INFORMASI STRATEGIS PADA *WEBSITE*  
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA  
ISLAMIC INDEX (JII)**

**Skripsi**

**Sarmawati**

**NPM : 1951030357**



**Program Studi : Akuntansi Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/ 2023 M**

**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE*  
(ICG) TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN  
INFORMASI STRATEGIS PADA *WEBSITE*  
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA  
ISLAMIC INDEX (JII)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Akuntansi  
(S.Akun) Dalam Ilmu Akuntansi Syariah**

**Oleh**

**Sarmawati  
NPM. 1951030357**

**Program Studi : Akuntansi Syariah**

**Pembimbing I : H. Supaijo, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Rahmat Fajar Ramdani, S.E., M.Si.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Pengungkapan informasi dalam perusahaan secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu: pengungkapan wajib (*mandatory disclosures*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosures*). Pengungkapan merupakan salah satu prinsip dalam sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*), yaitu transparansi. Baik pengungkapan wajib maupun pengungkapan sukarela merupakan cara untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Apakah *Islamic Corporate Governance* (ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independen dan kepemilikan manajerial) secara persial memiliki pengaruh terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis pada *Website* Perusahaan yang terdaftar Di JII 2023 dan bagaimana dalam pandangan perspektif islam. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *islamis corporate governance* terhadap luas pengungkapan informasi strategis pada *website* perusahaan. Berdasarkan dengan judul yang diangkat, jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan dibantu dengan alat hitung menggunakan program *SPSS For Windows versi 21*.

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2023. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 perusahaan. Data penelitian diuji menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independen, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan informasi strategis pada *website* perusahaan. Dalam perspektif islam konsep Keadilan serta Kebenaran dalam Akuntansi Islam juga diperlukan dalam pengungkapan Informasi strategis.

Kata Kunci: *Islamic Corporate Governance*, dan Luas Pengungkapan Informasi Strategis pada *Website* Perusahaan

## **ABSTRACT**

*Information disclosure in companies is broadly divided into two, namely: mandatory disclosures and voluntary disclosures. Disclosure is one of the principles in the corporate governance system, namely transparency. Both mandatory disclosure and voluntary disclosure are ways to convey information about the company's condition to stakeholders.*

*The problem formulation in this research is whether Islamic Corporate Governance (size of the board of commissioners, composition of independent commissioners and managerial ownership) has a partial influence on the extent of strategic information disclosure on company websites registered with JII 2023 and how from an Islamic perspective. This research aims to examine the influence of Islamic corporate governance on the extent of strategic information disclosure on company websites. Based on the title raised, this type of research uses quantitative descriptive methods. Data analysis in this research uses multiple linear regression analysis and is assisted by calculating tools using the SPSS For Windows version 21 program.*

*Data collection in this research used a purposive sampling method on companies listed in the Jakarta Islamic Index (JII) in 2023. The sample in this research was 25 companies. Research data was tested using multiple regression analysis. The results of this research show that the size of the board of commissioners, the composition of independent commissioners, and managerial ownership do not have a significant effect on the extent of strategic information disclosure on the company website. From an Islamic perspective, the concepts of Justice and Truth in Islamic Accounting are also needed in disclosing strategic information.*

*Keywords: Islamic Corporate Governance, and Extent of Disclosure of Strategic Information on Company We*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat :Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289*

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarmawati  
NPM : 1951030357  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Pada Website Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2023



**Sarmawati**

**NPM. 1951030357**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Pengaruh *Islamic Corporate Governance (ICG)*  
Terhadap Luas Pengungkapan Informasi  
Strategis Pada Website Perusahaan Yang  
Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII)**

Nama : Sarmawati  
NPM : 1951030351  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan  
Lampung

**Pembimbing I**

**H. Supaijo, S.H., M.H.**  
NIP. 196503121994031002

**Pembimbing II**

**Rahmat Fajar Ramdani, M.Si.**  
NIP. 199103302019031018

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Akuntansi Syariah**

**A. Zuliyansyah, S.Si., M.M.**  
NIP. 198302222009121003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “*Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Pada Website Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII)*” disusun oleh **Sarmawati** dengan NPM 1951030357, program studi Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Kamis/ 21 Desember 2023.

**Tim Penguji**

Ketua : **Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.** (.....)  
Sekretaris : **Erlin Kurniati, M.M.** (.....)  
Pengujil : **Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I.** (.....)  
Penguji II : **H. Supaijo, S.H., M.H.** (.....)

**Mengetahui**



**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Suryanto, M.M. Akt., CA.**

**NIP. 197009262008011008**

## MOTO

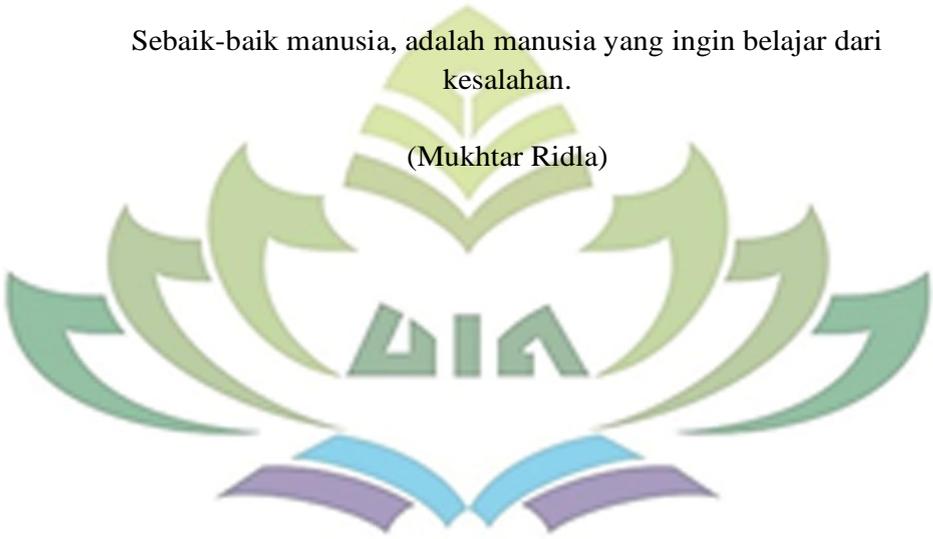
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).”

(Q.S Al-Baqarah :42)

Sebaik-baik manusia, adalah manusia yang ingin belajar dari kesalahan.

(Mukhtar Ridla)



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala atas segala nikmat-Nya sehingga penulis mampu menyajikan hasil penelitian ini yang semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim dan rasa syukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan hasil penelitian ini kepada:

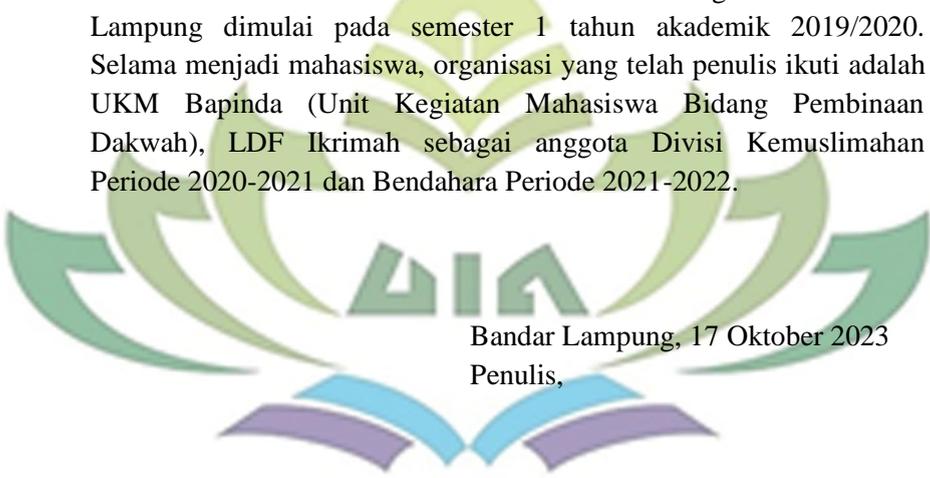
1. Kepada Orang tua penulis yang selalu menjadi alasan untuk selalu bertahan disetiap langkah. Ayahanda tersayang Sarkim dan ibunda tercinta Samsiah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, mendukung, mendidik, membimbing, memotivasi, serta tidak pernah berputus asa mencari rezeki dari pagi hingga sore dengan bercucran keringat membasahi tubuh untuk membiayai penulis agar bisa membuktikan bahwa seorang petani yang penghasilannya tidak menentu mampu untuk menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah Swt, dipermudahkannya disetiap langkahnya dan mendapatkan keberkahan baik didunia maupun diakhirat.
2. Kepada kakak-kakak tercinta, Nur Saman, Sadiman, Santawi. Kakak-kakak ipar tersayang, Ejeh, Ferawati, Amnah. Yang selalu mendoakan, selalu ada, selalu memberikan semangat, support, dan dukungan kepada si bungsu kalian ini, selalu memberikan bantuan baik material maupun non material, selalau ada disaat suka maupun duka, dan bahu-membahu membantu proses perkuliahan penulis hingga lulus.
3. Kepada ponakan-ponakan yang dicintai dan disayangi, Endra Apriliansyah, Iqbal Pratama, Yoga Bahtiar, Gibran Alfarizi, Nur Fadilah, Suci. Yang telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang dalam menyelesaikan studi ini.
4. Kepada pembimbing sekaligus orang tua kedua penulis dikampus yaitu H. Supaijo, S.H., M.H. dan Bapak Rahmat Fajar Ramdani, M.Si. yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis serta memberi motivasi, arahan dan dukungan untuk perjalanan penulis kedepannya.

5. Almamater tercinta, UIN Raden Intan Lampung yang penulis banggakan, tempat penulis menuntut ilmu, mempelajari hal baru, dan mengajarkan penulis tentang hal yang lebih luas lagi.
6. Terakhir penulis persembahkan untuk diri sendiri, Sarmawati. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, terima kasih tetap memilih berusaha, berjuang, dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan dan dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimana pun berada dan bagaimana pun keadaannya, Sarma. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Sarmawati, dilahirkan di Way Kanan pada tanggal 12 November 2001. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Sarkim dan Ibu Samsiah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Ulum Kandau Ulu, selesai pada tahun 2013. Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Islam Banjit, selesai pada tahun 2016. Lalu melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMAN) 02 Banjit Way Kanan, selesai pada tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 2019/2020. Selama menjadi mahasiswa, organisasi yang telah penulis ikuti adalah UKM Bapinda (Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Pembinaan Dakwah), LDF Ikrimah sebagai anggota Divisi Kemuslimahan Periode 2020-2021 dan Bendahara Periode 2021-2022.



Bandar Lampung, 17 Oktober 2023  
Penulis,

Sarmawati  
NPM. 1951030357

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim.*

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Pada Website Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII)”** dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam saya haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia. Skripsi ini ditulis sebagai syarat menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penyelesaian skripsi ini tak lupa diucapkan terimakasih kepada pihak-pihak dibawah ini yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sekaligus sebagai Pembimbing Akademik 1 yang telah banyak memberikan arahan, masukan, juga motivasi untuk penulis serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak A. Zuliansyah, S.Si., M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan arahan dan kemudahan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. Supaijo, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis.
5. Bapak Rahmat Fajar Ramdani Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan

bimbingan dan motivasi serta pengarahan yang sangat berarti bagi penulis.

6. Bapak ibu Dosen khususnya jurusan Akuntansi Syariah serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam selaku guru yang amat berjasa bagi penulis baik dalam memberikan ilmu, pembentukan karakter juga perubahan pola pikir dan sudut pandang yang telah berpartisipasi memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulis selama masa studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta bermanfaat kedepannya.
7. Kepada seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang turut berperan dalam penyelesaian studi penulis.
8. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mempertemukan penulis dengan banyak jendela dunia.
9. Kedua orangtua penulis, Saudara dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan, memotivasi, dan memberi dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Para sahabat, teman-teman seperjuangan, grup Generasi Akuntansi, keluarga KKN-DR Bonglai, dan keluarga kontrakan Cemara yang turut berperan dalam memberikan doa, semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada sahabat, Siti Fitriani yang selalu ada sejak MTs, SMA, hingga saat ini, walaupun jarak memisahkan, namun saling mendoakan dan menyemangati satu sama lain.
12. Kepada guru dan teman-teman SMAN 02 Banjit yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya yang luar biasa kepada penulis.
13. Kepada Adi Raisman UT yang selalu memotivasi, menyemangati dan menemani penulis dalam setiap prosesnya.
14. Kepada Ramdani yang selalu mendoakan, menyemangati, memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan dengan baik.

15. Kepada seluruh keluarga besar Akuntansi Syariah Kelas A angkatan 2019 yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan semangat kepada penulis, semoga kita semua dapat menjadi orang bermanfaat. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Orang Tua, Bapak dan Ibu dosen, sahabat, dan seluruh pihak yang terlibat. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Hal yang tak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu dan biaya yang dimiliki. Untuk kiranya para pembaca dapat memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun guna melengkapi tulisan ini dan menjadikannya lebih baik lagi.

*Wassalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Bandar Lampung, 17 Oktober 2023  
Penulis,

Sarmawati  
NPM. 1951030357

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Batasan Masalah .....	13
D. Rumusan Masalah .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Tujuan Penelitian .....	14
G. Kajian PenelitianTerdahulu .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS</b>	
A. Teori Yang Digunakan .....	20
1. <i>Stakeholder theory</i> (Teori Pemangku Kepentingan) .....	20
2. <i>Agency Theory</i> (Teory Keagenan) .....	21
3. <i>Islamic Corporate Governance (ICG)</i> .....	22
4. Pengungkapan Informasi.....	36
5. Pengungkapan Informasi Strategis .....	38
6. Website Perusahaan.....	44
7. Perusahaan Jakarta Islamic Index (JII).....	45
B. Kerangka Pemikiran .....	46
C. Hipotesis .....	37

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Metode dan Sifat Penelitian.....	53
B. Jenis Penelitian. ....	53
C. Populasi dan Sempel.....	54
D. Sumber Data.....	54
E. Metode Pengumpulan Data .....	57
F. Definisi Operasional Variabel.....	58
G. Teknik Analisis Data .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Hasil Penelitian .....	67
B. Analisis Data .....	71
1. Analisis Statistik.....	71
2. Uji Asumsi Klasik .....	73
3. Uji Hipotesis .....	80
C. Pembahasan .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	15
2.	Tabel 3.1 Daftar Saham Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII).....	54
3.	Tabel 3.2 Daftar Perusahaan kriteria Sampel .....	56
4.	Tabel 3.3 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel .....	60
5.	Tabel 4.1 Daftar Perusahaan kriteria Sampel .....	68
6.	Tabel 4.2 Tabulasi Data Penelitian .....	69
7.	Tabel 4.3 Statistik Deskriptif .....	72
8.	Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas .....	74
9.	Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonearitas .....	76
10.	Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	79
11.	Tabel 4.7 Uji Autokorelasi Model Summary .....	79
12.	Tabel 4.8 Uji Regresi Linear Berganda.....	80
13.	Tabel 4.9 Uji Statistik T .....	83
14.	Tabel 4.10 Uji Determinasi.....	84

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	47
2. Gambar 4.1 Uji Normal P-P Plot.....	74
3. Gambar 4.2 Uji Scatter-Plot.....	77



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan latar belakang, penulis akan membahas penegasan judul agar mempermudah dan memeperjelas dalam memahami judul proposal ini yaitu mencakup arti dan makna dari istilah-istilah yang terkait dengan judul. Dari penegasan judul tersebut, diharapkan untuk meminimalisir adanya kekeliruan dalam pemakaian istilah yang ada dalam judul. adapun judul Proposal Skripsi ini adalah **“Pengaruh *Islamic Corporate Governance (ICG)* Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Pada Website Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII)”**. Adapun penjelasan dari istilah-istilah dari judul sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh

Pengaruh dapat diartikan adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.<sup>1</sup>

#### 2. Islamic Corporate Governance (ICG)

ICG merupakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip islam. kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan harus berdasarkan pada moral dan nilai-nilai syariah, tujuan ICG sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, tetapi dalam kode moral yang berbasis agama islam. hal tersebut dilakukan untuk dapat memberikan manfaat bagi pihak

---

<sup>1</sup>Cindy Alristiani, —Pengaruh Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Terhadap Reputasi Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2017-2020,|| Social Responsibility, t.t., 122.

stakeholder.<sup>2</sup>

### 3. Pengungkapan

Pengungkapan yaitu informasi dalam laporan tahunan perusahaan secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu : pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda.<sup>3</sup>

### 4. Informasi Strategis

Informasi strategis yaitu informasi yang bersifat nonkeuangan dan berhubungan dengan masa depan perusahaan dan informasi strategis menjadi penting karena memuat gambaran arahan dan jangkauan jangka panjang perusahaan.

Sistem Informasi Strategis adalah dukungan terhadap sistem informasi komputer yang digunakan pada tingkat organisasi yang mengubah tujuan operasional, produk jasa dan hubungan lingkungan untuk membantu organisasi. Sedangkan menurut Martin (1994), Sistem Informasi Strategis adalah alat untuk mengimplementasikan strategi dengan menggunakan informasi, pengolahan informasi dan komunikasi informasi. Menurut Laudon(1997), Sistem Informasi Strategis adalah sistem komputer yang digunakan pada setiap tingkatan organisasi yang

---

<sup>2</sup> Asrori, "Implementasi Islamic Corporate Governance Dan Implikasi Terhadap Kinerja Bank Syariah," *Jurnal Dinamika Akuntansi* 06,01 (2014): 90–102.

<sup>3</sup> Sinung Primastuti, "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21, no. 2 (2019): 195–204, <https://doi.org/10.34208/jba.v21i2.623>.

mengubah tujuan operasional, produk jasa dan hubungan lingkungan untuk membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif.<sup>4</sup>

## 5. *Website*

*Website* Merupakan salah satu media yang paling penting dalam penyebaran informasi saat ini, dan digunakan di banyak bidang khususnya perusahaan sebagai sumber *Competitive Intelligence* (CI).<sup>5</sup>

## 6. **Jakarta Islamic Index**

Jakarta Islamic Index adalah lembaga yang diluncurkan Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Managemen pada tanggal 3 juli 2000 yang bertujuan memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian penegasan judul tersebut, maka maksud judul Skripsi ini adalah untuk menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dengan memahami apakah terdapat Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII).

---

<sup>4</sup> Firda Amalia and Herry Laksito, "Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Pada Website Perusahaan," *Diponegoro Journal of Accounting* 2, no. 1 (2013): 1–11.

<sup>5</sup> Dina Fitria Murad, "Aplikasi Intelligence Website Untuk Penunjang Laporan Paud Pada Himpaudi Kota Tangerang," *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2013): 20–45.

<sup>6</sup> Ghoniyah, N., & Hartono, S. (2014). The Role of Islamic Corporate Governance in SMEs to Improve the Welfare of Society. *International Journal of Economic Research*, 11(3).

## B. Latar Belakang Masalah

Seluruh perusahaan setiap tahunnya akan membuat laporan keuangan untuk melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan tersebut menggambarkan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama satu periode yang lalu. Semakin ketatnya persaingan, perusahaan semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya, salah satunya dengan banyaknya informasi yang diungkapkan pada laporan tahunan mereka. Laporan tahunan merupakan media bagi manajer untuk mengungkapkan informasi kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Oleh karena itu, laporan tersebut dapat digunakan para pemegang saham, stakeholders dan pihak-pihak lainnya untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Pengungkapan informasi strategis seiring dengan perkembangannya tidak hanya dilakukan melalui laporan tahunan perusahaan. *Website*, yang telah menjadi standar alat komunikasi di perusahaan, digunakan juga oleh manajemen sebagai media untuk mengungkapkan informasi strategis. Pengungkapan informasi strategis tergolong pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dan belum diregulasi (*unregulated*).<sup>7</sup>

Pengungkapan informasi dalam perusahaan secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu: pengungkapan wajib (*mandatory disclosures*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosures*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan / BAPEPAM dan LK telah mengatur bentuk dan isi laporan tahunan yang wajib diungkapkan melalui Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-134/BL/2006 peraturan X.K.6 tentang kewajiban

---

<sup>7</sup> Sinung Primastuti, "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis," *Diponegoro Journal of Accounting* 1 (2013): 1–20.

penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan - perusahaan publik), sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang melebihi dari yang diharuskan oleh peraturan. Dalam konteks ini, manajemen perusahaan bebas memilih untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dianggap relevan dan mendukung dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Luas pengungkapan sukarela dalam setiap perusahaan berbeda tergantung pada kebutuhan maupun kondisi perusahaan, dan informasi strategis perusahaan dapat dituangkan dalam pengungkapan sukarela maupun pengungkapan yang bersifat wajib.<sup>8</sup>

Pengungkapan sukarela dari informasi strategis secara bertahap lebih pada praktek umum perusahaan, karena bermanfaat sebagai petunjuk, seperti kemampuannya untuk membuat suatu perusahaan lebih unggul dari perusahaan lain dan kegunaannya dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh investor-investor profesional, bank, analis dan perantara keuangan. Sedangkan pengungkapan sendiri merupakan salah satu prinsip dalam sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*), yaitu transparansi. Baik pengungkapan wajib maupun pengungkapan sukarela merupakan cara untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).<sup>9</sup>

Masalah *corporate governance* menjadi menarik perhatian karena terjadinya krisis ekonomi di beberapa negara Asia termasuk Indonesia tahun 1997 dan 1998, yang berkembang menjadi krisis multi dimensi berkepanjangan. Kajian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan

---

<sup>8</sup>Josephus Alberth Makatita, "Dewan Komisaris Dan Pengungkapan Informasi Strategis Pada Website Perusahaan," *Jurnal Akuntansi* 9, no. 2 (2015): 30–60.

<sup>9</sup>Sinung Primastuti, "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis," 2019.

perusahaan yang tinggi; kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan dewan komisaris; ketiga, inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal; dan kelima, ketidakmemadainya pengawasan oleh para kreditor.<sup>10</sup>

GCG atau tata kelola perusahaan yang baik adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham manajemen (manajer) perusahaan kreditor pemerintah karyawan dan pemegang saham internal serta eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sebuah system yang mengendalikan perusahaan. Akan tetapi dalam prinsip islam menggunakan *Islamic Corporate Governance* yang mengadopsi dari GCG konvensional dengan menggunakan prinsip syariah. Islamis Corporate Governance merupakan bentuk tata kelola perusahaan, tata kelola sangat diperlukan dalam perusahaan karena dengan adanya tata kelola yang memperhatikan beberapa komponen aspek sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.<sup>11</sup>

Perusahaan-perusahaan yang melaksanakan corporate governance akan memberikan lebih banyak informasi dalam rangka mengurangi asimetri informasi. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat pengungkapan, semakin baik pelaksanaan corporate governance oleh suatu perusahaan, maka akan semakin banyak informasi yang diungkap. Demikian juga sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang memberikan pengungkapan yang tinggi dalam laporan tahunan akan menunjukkan bahwa implementasi corporate governance pada perusahaan tersebut semakin baik. Sistem tata kelola di perusahaan-perusahaan Indonesia menganut sistem *two tier*, dimana dalam susunan dewan terdapat Dewan

---

<sup>10</sup> Sinung Primastuti.

<sup>11</sup> Sinung Primastuti.

Direksi (*Board of Director*) dan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*). Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam kerangka tata kelola perusahaan, karena Dewan Direksi sebagai pihak eksekutif bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan, sementara Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi kinerja Dewan Direksi dan kebijakan yang dibuatnya.<sup>12</sup>

Di Indonesia penelitian tentang pengaruh corporate governance terhadap luas pengungkapan informasi diantaranya dilakukan oleh Khomsiyah dalam Primastuti yang didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara implementasi corporate governance dengan tingkat pengungkapan informasi. Ukuran perusahaan dan regulasi secara positif berhubungan dengan indeks corporate governance dan pengungkapan informasi. Struktur kepemilikan masyarakat, komposisi komisaris independen, dan keberadaan komite audit mempunyai hubungan yang signifikan dengan indeks corporate governance dan pengungkapan informasi. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Mintara dalam Primastuti, didapatkan hasil corporate governance dan regulasi saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan tahunan. Kemudian, untuk ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dewan komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan.<sup>13</sup>

Kedua penelitian tersebut diatas tidak memisahkan item pengungkapan wajib dan sukarela. Selain itu, terdapat penelitian tentang pengaruh corporate governance terhadap luas pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*) yang dilakukan oleh Sinung Primastuti, dalam penelitiannya Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap luas

---

<sup>12</sup> Sinung Primastuti.

<sup>13</sup> Sinung Primastuti.

pengungkapan informasi strategis. Dewan komisaris merupakan dewan pengawas yang bertugas mengawasi kinerja dewan direksi pada perusahaan. Ukuran dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah total dewan komisaris yang dimiliki perusahaan yang terdiri dari komisaris utama, komisaris independent, dan komisaris.<sup>14</sup> Kemudian, Anggria Aprilianingrum, dalam penelitiannya Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela melalui *website* perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan.<sup>15</sup>

Dalam sistem tata kelola perusahaan, peran dewan komisaris sangat penting, yaitu sebagai pengawas kinerja dewan direksi dan kebijakan yang dibuat dewan direksi. Untuk mewujudkan akuntabilitas perusahaan, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas, sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi social Sinung Primastuti. Dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris tidak berhubungan dengan *sustainability disclosure*. Sedangkan dalam penelitian Josephus Alberth Makatita, menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi strategis di *website*. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, fungsi pengawasan akan lebih efektif sehingga diikuti dengan pengungkapan informasi strategis yang lebih luas. Perusahaan dalam operasinya memerlukan tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara pemilik, dewan komisaris, dan dewan direksi

---

<sup>14</sup> Primastuti, "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis.(2012)"

<sup>15</sup> Aprilianingrum, Anggria. "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela melalui Website. Universitas Surabaya, 2016.

untuk menentukan tujuan perusahaan dan pengukuran kinerja serta kewenangan dan pengendalian manajemen. Kepemilikan perusahaan dapat dilihat dari sudut konsep tata kelola perusahaan, pemilik sebagai mekanisme eksternal, yang berhubungan kuat dengan dewan komisaris dan direksi.<sup>16</sup>

Keberadaan Dewan Komisaris belum memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip *Corporate Governance*, khususnya mengenai perlindungan terhadap investor. Untuk mendorong implementasi *Good Corporate Governance*, dibuatlah sebuah organ tambahan dalam struktur perseroan. Organ-organ tambahan tersebut salah satunya adalah Dewan Komisaris Independen. Keberadaan Komisaris Independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Karena Komisaris Independen tidak terpengaruh oleh manajemen, maka mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholder*-nya.<sup>17</sup>

Menurut Penelitian Yudika Amanda Putra Silaban komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan informasi strategis di *website*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, semakin tidak efektif peran dewan independen dalam melaksanakan fungsinya sehingga tidak diikuti dengan pengungkapan informasi strategis.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Josephus Alberth Makatita komisaris independen mempunyai hubungan yang positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Hal itu dikarenakan komisaris independen tersebut dapat memberikan masukan kepada

---

<sup>16</sup> Alberth Makatita, "Dewan Komisaris Dan Pengungkapan Informasi Strategis Pada Website Perusahaan."

<sup>17</sup> Sinung Primastuti, "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis," 2019.

<sup>18</sup> Yudika Amanda Putra Silaban, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing," Jom Fekon Vol.2 No. 1 Februari 2015.

dewan direksi yang mungkin tidak sependapat dengan dewan direksi.<sup>19</sup> Kondisi demikian dapat meningkatkan perilaku direksi untuk mendukung komisaris dalam hal melaporkan pengungkapan informasi secara luas tentang perusahaan termasuk informasi strategis perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian dalam suatu perusahaan yang dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya *agency cost*. Biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal merupakan *agency cost*. *Agency theory* akan menimbulkan adanya asimetri informasi antara manajemen yang berperan sebagai agen perusahaan dalam menjalankan operasi bisnisnya dan pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal. Asimetri informasi terjadi sebab manajemen sebagai pihak yang memiliki informasi lebih banyak mengenai perusahaan tidak akan memberikan keseluruhan informasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor seperti biaya penyajian informasi, keinginan pihak manajemen dalam menghindari risiko terlihat kelemahannya, dan waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi perusahaan kepada para stakeholder, serta faktor-faktor penentu lain yang dapat berpengaruh. Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa perilaku *moral hazard* dan asimetri informasi dapat dicegah melalui perjanjian dengan memberikan insentif berupa kompensasi keuangan yang diperhitungkan sebagai *agency cost*, sehingga manajer akan termotivasi untuk menyediakan pengungkapan sukarela untuk mengurangi *agency cost*. Ada beberapa alternatif untuk mengurangi *agency cost*, diantaranya dengan adanya kepemilikan saham

---

<sup>19</sup> Alberth Makatita, "Dewan Komisaris Dan Pengungkapan Informasi Strategis Pada Website Perusahaan."

oleh manajemen.<sup>20</sup>

Perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang tinggi. Kepemilikan manajerial merupakan besarnya kepemilikan saham perusahaan oleh dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam kepemilikan manajerial berarti manajer selain mempunyai tugas menjalankan operasional perusahaan, tetapi juga sebagai pemegang saham, maka akan menyelaraskan kepentingannya. Hal ini konsisten dengan penelitian Sinung Primastuti yang menyatakan kepemilikan manajemen berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan sukarela. Sedangkan dalam penelitian Rouf dan Al-Harun menyatakan hasil yang berbeda yaitu kepemilikan manajerial berhubungan negatif dengan pengungkapan sukarela informasi, yang berarti semakin tinggi kepemilikan manajerial maka menyebabkan rendahnya pengungkapan sukarela.<sup>21</sup>

Perkembangan teknologi akhir-akhir ini juga mengarahkan para pengguna informasi perusahaan kepada tuntutan untuk memberikan informasi dengan lebih cepat, ringkas, dan praktis. *Website* menawarkan kemungkinan untuk menjangkau pengguna informasi strategis perusahaan secara lebih luas dalam hubungannya dengan penyediaan informasi tanpa batas waktu dan batasan-batasan tertentu. Luas pengungkapan informasi strategis dilihat dari item-item pengungkapan yang ditampilkan di dalam *website* perusahaan. Informasi-informasi yang dimunculkan perusahaan biasanya bersifat positif, yaitu tidak teraudit dan cenderung untuk menganggap dirinya baik. Sehingga, dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak valid. Perbedaan-perbedaan yang ada tersebut telah mendorong penelitian ini. Dan nantinya akan dihubungkan dengan keberagaman perusahaan-perusahaan

---

<sup>20</sup> Alfiana Fitri, "Analisis Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan," *Jurnal Akrua* 7, no. 2 (2013): 120–65.

<sup>21</sup> Sinung Primastuti, "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis," 2019.

yang terdaftar di JII .

Di pasar bursa sendiri ada 2 indeks syariah yakni Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). ISSI dikeluarkan oleh OJK untuk indeks saham syariah yang tercatat di DES. Sedangkan, untuk indeks JII adalah indeks yang menghitung harga rata-rata untuk saham-saham yang memenuhi kriteria syariah.

Peneliti menggunakan indeks saham syariah yaitu di Jakarta Islamic Index (JII). Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review Daftar Efek Syariah (DES) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya JII diharapkan agar kepercayaan investor meningkat untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan investasi sesuai dengan syarat Islam.<sup>22</sup>

Alasan pemilihan Jakarta Islamic Index (JII) sebagai indeks saham syariah yang diteliti yaitu saham JII terdiri 30 perusahaan yang telah diseleksi sebanyak dua kali dalam setahun sesuai kriteria tertentu, seperti perusahaan harus menjalankan kegiatan sesuai syariat Islam dan memiliki nilai saham tertinggi diantara perusahaan-perusahaan syariah lainnya. Tingginya kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk berinvestasi sesuai dengan hukum atau syariat Islam membuat meningkatnya indeks saham di JII. Tak heran banyak investor yang mulai mengalihkan portofolionya ke saham-saham yang masuk

---

<sup>22</sup> Hadyan, "Pengaruh Laba Akuntansi, Komponen arus kas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode Tahun 2015-2019"

dalam DES dan tentunya punya fundamental serta kinerja yang baik. Selain itu, kondisi pere<sup>23</sup>konomian dalam negeri yang stabil juga ikut berpengaruh pada kinerja 3 saham-saham penghuni JII yang didominasi oleh saham-saham emiten barang konsumsi, aneka industri, dan konstruksi.

Beberapa variabel *corporate governance* yang telah digunakan dalam penelitian tersebut, digunakan lagi untuk penelitian ini yaitu jumlah dewan komisaris dan komposisi komisaris independen sedangkan untuk variabel *Blockholder* lebih dikhususkan lagi dengan kepemilikan manajerial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik pengungkapan informasi strategis pada *website* perusahaan yang terdaftar di JII serta menguji apakah ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independen, dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi strategis secara sukarela pada *website* perusahaan.<sup>24</sup> Pemilihan ketiga variable ini menarik perhatian penulis karena ketiga komponen ini sangat erat kaitannya dengan pengungkapan yang akan dilakukan perusahaan dan penelitian ini juga menarik untuk dilakukan karna dengan mengkomunikasikan strategi perusahaan kepada para pemangku kepentingan, dapat memberikan kesempatan perusahaan untuk membedakan dirinya dari perusahaan lain, dan juga terdapat ketidakkonsistenan dari beberapa penelitian terdahulu.

Adapun keterbaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu : 1) variabel yang diteliti adalah pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Pada *Website* Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII), sedangkan penelitian sebelumnya Pengaruh Mekanisme

---

<sup>23</sup> Hadyan.

<sup>24</sup> Siagian and Ghozhali, "Pengaruh Struktur Dan Aktivitas Good Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Secara Sukarela Pada Website Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia."

Tatakelola Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Pada *Website* Perusahaan Dalam Perspektif Akuntansi Islam (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index 2016-2019), Waktu penelitian, waktu penelitian ini dilakukan tahun 2023 triwulan 1 dimana waktu penelitian ini lebih up to date di bandingkan penelitian sebelumnya yang meneliti tahun 2019 ke bawah.

Dari latar belakang tersebut tentunya peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “**Pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Pada *Website* Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII).**

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa batasan masalah pada penelitian ini dibatasi hanya pada *Islamic Corporate Governance* melalui Ukuran dewan komisaris, Komposisi komisaris independen dan Kepemilikan Manajerial guna melihat potensi Luas Pengungkapan Informasi Strategis pada *Website* Perusahaan yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index 2023.

### **D. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah *Islamic Corporate Governance* (ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independen dan kepemilikan manajerial) secara persial memiliki pengaruh terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis pada *Website* Perusahaan yang terdaftar Di JII 2023?
2. Bagaimana pandangan perspektif islam mengenai

*Islamic Corporate Governance* (ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independen dan kepemilikan manajerial) terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis pada *Website* Perusahaan yang terdaftar Di JII 2023?

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisis Pengaruh *Islamic Corporate Governanace* (ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independen dan kepemilikan manajerial) secara persial Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis pada *Website* Perusahaan yang terdaftar Di JII 2023.

## **F. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis merupakan manfaat berupa kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Bagi akademik Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau perbandingan bagi mahasiswa atau pihak lain yang ingin melakukan penelitian sejenis dan sebagai saran untuk merumuskan strategi pengembangan pendidikan, khususnya dibidang akuntansi syariah.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis merupakan manfaat berupa kontribusi untuk pemecahan permasalahan atau alternatif penyelesaian praktek. Bagi instansi atau perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dalam bentuk kontribusi sebagai masukan untuk penerapan tata kelola perusahaan yang berbasis syariah dan modal intelektual serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, hasil penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai referensi dan bahan acuan poin-poin apa yang sudah pernah diteliti dan apa yang perlu diteliti, agar tidak adanya plagiasi perlu adanya kebaruan dalam sebuah penelitian. Adapun ringkasan penelitian terdahulu dalam penelitian ini seperti dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Kajaaian Penelien Terdahulu**

No	Pengarang dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anggria Aprilianingrum & Nurul Hasanah Uswati Dewi (2018), Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Melalui Website Perusahaan	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela melalui <i>website</i> perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan dispersi (publik) dan leverage tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela melalui <i>website</i> perusahaan. <sup>25</sup>

<sup>25</sup> Aprilianingrum, Anggria. "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela melalui Website.

2.	Josephus Alberth Makatita (2017), Dewan Komisaris dan Pengungkapan Informasi Strategis	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aktivitas dewan komisaris dan Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi strategis pada <i>website</i> . <sup>26</sup>
3.	Gedie E Siagian, Imam Ghozhali (2017), Pengaruh Struktur dan Aktivitas Good Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis secara Sukarela pada <i>Website</i> Perusahaan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Ukuran dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan dengan arah negatif terhadap luas pengungkapan informasi strategis secara sukarela pada <i>website</i> perusahaan, Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan dengan arah positif terhadap luas pengungkapan informasi strategis secara sukarela pada <i>website</i> perusahaan. <sup>27</sup>

Universitas Surabaya, 2016.

<sup>26</sup> Josephus Alberth Makatita, "Dewan Komisaris Dan Pengungkapan Informasi Strategis," *Jurnal Akuntansi* 9, no. 2 (2015): 30–60.

<sup>27</sup> Siagian and Ghozhali, "Pengaruh Struktur Dan Aktivitas Good Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Secara Sukarela Pada

4.	Firda Amalia & Herry Laksito (2016), Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Pada <i>Website</i> Perusahaan.	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan informasi strategis pada <i>website</i> perusahaan sedangkan ukuran Dewan Komisaris, komposisi Komisaris Independen, dan kepemilikan <i>Blockholder</i> tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi strategis pada <i>website</i> perusahaan. <sup>28</sup>
5.	Amalia Kartika Rini (2016), Analisis Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam Laporan Tahunan	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif kepemilikan dispersi terhadap luas pengungkapan corporate governance. <sup>29</sup>

Website Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia.”

<sup>28</sup> Amalia and Laksito, “Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Pada Website Perusahaan.”

<sup>29</sup> Amalia Kartika Rini, “Analisis Luas Pengungkapan Corporate Governance Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik Di Indonesia” (Universitas Diponegoro Semarang, 2016).

	Perusahaan Publik di Indonesia.		
--	---------------------------------------	--	--

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu periode sampel yang akan digunakan yaitu tahun 2023, lalu populasi yang berbeda yaitu perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index, serta penulis membahas Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Pada *Website* Perusahaan.

## H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat teruji secara sistematis, maka sistematika pembahasan dapat disajikan secara rinci sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

BAB I pendahuluan menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

### BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

BAB II landasan teori dan pengajuan hipotesis menguraikan tentang pustaka yang menjelaskan beberapa teori, diantaranya ; Selain itu menjelaskan hipotesis dan kerangka pemikiran dengan pokok pembahasan yang menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisa penelitian ini.

### BAB III METODE PENELITIAN

BAB III metode penelitian menguraikan tentang metode yang akan digunakan peneliti dalam menguji dan

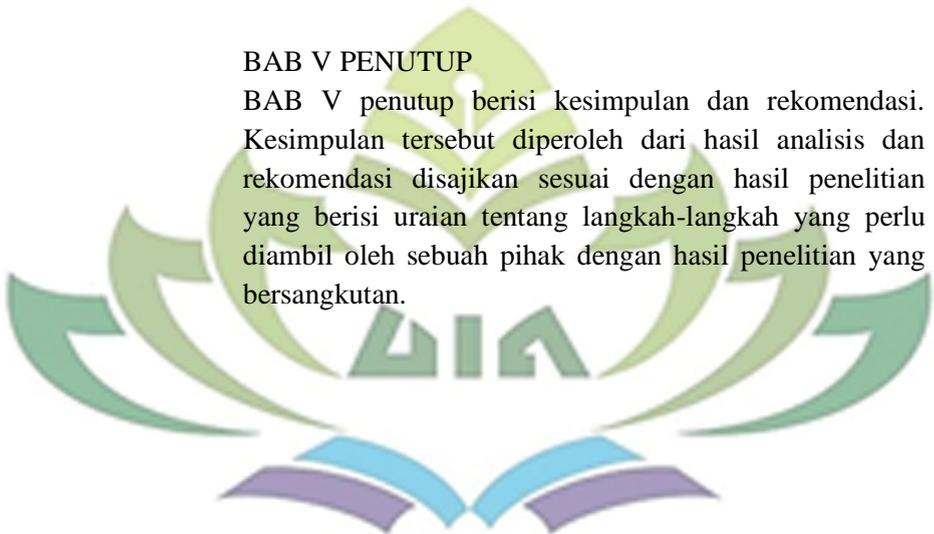
menganalisis penelitiannya yang mana dalam metode penelitian ini terdiri dari ; jenis dan sifat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, hipotesis dan teknik analisis data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang gambaran deskripsi data penelitian dan pembahasan hasil penelitian serta analisisnya.

#### BAB V PENUTUP

BAB V penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil analisis dan rekomendasi disajikan sesuai dengan hasil penelitian yang berisi uraian tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh sebuah pihak dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

#### A. Teori Yang Digunakan

##### 1. *Stakeholder Theory* (Teori Pemangku Kepentingan)

Teori *stakeholder* secara luas didefinisikan sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh operasi dan kegiatan perusahaan, pertama kali dikemukakan oleh Stanford Research Institute (SRI) pada tahun 1963 (Freeman, 1984) untuk menjelaskan tingkah laku perusahaan (*corporate behavior*), menurut Freeman dan McVea (2001) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.

Teori Stakeholder adalah perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain).” Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut.

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Batasan *stakeholder* mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik

secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholder* bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi *stakeholder*.<sup>30</sup>

## 2. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dan Scott (2000) Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan sebagai suatu versi dari *game theory* yang melaksanakan suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan kepada agen.

Teori keagenan adalah hubungan yang terjadi antara manajemen (agen) dengan pemilik perusahaan (*prinsipal*). *Prinsipal* mendelegasikan wewenangnya kepada agen untuk mengelola perusahaan. Untuk mengurangi konflik tersebut ada salah satu cara yaitu agen diharapkan untuk meningkatkan pengungkapan informasi perusahaan sebagai wujud pertanggung jawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan *prinsipal* kepada agen sehingga agen dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan informasi para *stakeholder* dengan melakukan pengungkapan informasi secara sukarela melalui *website* perusahaan.<sup>31</sup>

Permasalahan keagenan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diatasi dengan tata kelola perusahaan

---

<sup>30</sup> Vidi Hadyarti and Tubagus M. Mahsin, "Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Good Corporate Governance (Gcg) Sebagai Indikator Dalam Menilai Nilai Perusahaan," *Kompetensi* 13, no. 1 (2019): 17–33.

<sup>31</sup> Ridho Alief Noviawan, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan" (Universitas Diponegoro Semarang, 2017).

yang baik. Tata Kelola Perusahaan merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan stakeholders untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh return. Teori keagenan memberikan landasan utama dalam kaitannya dengan penyediaan informasi tentang aktivitas yang telah terjadi.<sup>32</sup>

Berdasarkan perspektif teori keagenan, informasi yang disajikan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan pemilik dan manajer, serta dapat dijadikan oleh pemegang saham dan Stakeholder lainnya untuk mengontrol aktivitas manajer. Semakin besar tingkat pengungkapan sukarela (informasi strategis), maka masalah agensi yang ditimbulkan juga akan sedikit.<sup>33</sup>

### 3. Islamic Corporate Governance (ICG)

Bermodal dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, Indonesia diharapkan mampu untuk memahami dan menjalankan prinsip-prinsip keislaman dalam segala aspek kehidupan. Bermodal dari konsep *Good Corporate Governance*, *Islamic Corporate Governance* memiliki tujuan yang lebih dari sebatas aturan untuk meningkatkan keberhasilan suatu lembaga/organisasi. Di tingkat individu maupun keseluruhan dengan syarat implementasi ICG dapat berjalan. Lebih dari itu, tujuan ICG dapat memberikan arahan-arahan kepada penciptaan nilai dan moral yang berdasarkan hukum-hukum Islam/maqashid syariah.

Dijelaskan bahwasanya ICG merupakan suatu tindakan untuk menciptakan era baru pada bidang

---

<sup>32</sup> Primastuti, "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis.(2012)"

<sup>33</sup> Primastuti.

ekonomi yang memiliki sistem dan tata hukum keislaman. Tujuan dari ICG yaitu sebagai pengarah terhadap terciptanya tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang memiliki nilai moral dan sosial sesuai dengan hukum keIslaman. Perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan baik dan benar. Secara garis besar tujuan dari penerapan *Islamic Corporate Governance* memiliki kesamaan dengan GCG konvensional, akan tetapi dalam penerapan ICG lebih mengacu pada nilai moral syariat Islam.<sup>34</sup>

Allah SWT dalam Al-Quran dalam Surat As-Sajdah ayat 5 tentang tata kelola yang baik Tafsir Jalalayn. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa Allah SWT adalah pengatur seluruh alam dan isinya, hal tersebut dinyatakan dalam penciptaan alam raya. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai Khalifah di bumi sebagai pengelola bumi dan isinya dengan cara yang sebaik-baiknya.

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ  
مِقْدَارُهُ ٭٭٭ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya : “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”.

Tujuan utama pelaksanaan ICG yaitu mensejahterakan masyarakat, lebih dari itu peran dari ICG untuk memberikan rasa aman terhadap *stakeholder*. Sehingga dapat dikatakan *Islamic Corporate Governance* merupakan sebuah mekanisme atau sistem

<sup>34</sup> Khusnawati, S. (2017). Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja dan Reputasi perbankan Syariah.

yang memberikan rasa aman terhadap stakeholder. Sesuai dengan penelitian menjelaskan bahwasanya Islamic corporate governance mampu meningkatkan rasa aman terhadap kepentingan stakeholder. Dari penjelasan di atas yang menjadi pembeda ICG adalah tujuannya untuk menciptakan kejujuran, keadilan, dan rasa aman hal tersebut sesuai dengan tujuan nilai dan norma ke-Islaman atau *maqashid syariah*. ICG merupakan hubungan antar pihak sistem nilai dan berdasarkan nilai mekanisme pengaturan nilai Islam, Pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan agar dapat menggunakan haknya dan Mereka berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.<sup>35</sup>

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi adalah salah satu bentuk etika Islam dan ekspresi ketidakberpihakan dan kejujuran oleh semua pihak membuat pengungkapan yang akurat, adil dan transparan dalam semua kegiatan bisnis mereka. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas yang sesuai dengan perspektif Islam adalah akuntabilitas berdasarkan dua peran manusia yaitu sebagai hamba Allah yang diwujudkan melalui "akun ketundukan" dan wakil Allah di bumi (Khalifatullah Fil Ardh) yang

---

<sup>35</sup> Rahma, Y. (2018). Islamic corporate governance and Islamic social responsibility towards Maqashid Shariah. *KnE Social Sciences*, 70-87.

diwujudkan melalui “akun kreativitas”. Akuntansi dalam bahasa arabnya adalah AlMuhasabah berasal dari kata masdar hassaba-yuhasbu yang artinya menghitung atau mengukur. Secara umum prinsip Akuntansi Syariah, dijelaskan dalam Al-qur’an surat Al-Ahzab ayat 15, dan Al-Isra ayat 36.

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبِرَ ۚ وَكَانَ عَاهِدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

Artinya: Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah: "Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)". Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak

*stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئُومٍ فَأَكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِئْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا ۚ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا ۚ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۚ فَسَوْقٌ ۚ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia

menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai Good Corporate Governance berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan

baik". Muqorobin menyatakan bahwa Good Corporate Governance dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini :<sup>36</sup>

1. Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas Umat Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya.<sup>37</sup> Dalam Alquran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Az Zumar ayat 38.

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ  
 اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ  
 اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ۗ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ  
 هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۗ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ  
 الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya : Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhalal-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.

<sup>36</sup> Muqorobin Masyudi. , Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar ( Universitas Muhammadiyah : Purwekerto) hlm.4

<sup>37</sup> Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, Islamic Business and economic Ethic ( Jakarta : Bumi Aksara, 2012 ) Hlm. 52

Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi. Baik menyangkut ibadah maupun Muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.<sup>38</sup>

2. Taqwa dan ridha, prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas fondasi taqwa kepada Allah dan ridha-Nya dalam QS at-Taubah: 109.

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ  
 مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ  
 جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya : Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk

<sup>38</sup>Mardani., Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. (Jakarta: Kencana. 2012), hlm 6

kepada orang- orang yang zalim.

Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak

3. Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan) Tawazun atau mizan (keseimbangan) dan al adalah (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. Tawazun lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah al- „adalah atau keadilan sebagai manifestasi Tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam QS ar-Rahman ayat 7-9 :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ( ) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

( ) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya : Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dalam konteks keadilan ( sosial ) , para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan,

memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya.

4. Kemashlahatan Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan ( kesejahteraan ) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefenisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufsadah. Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni :<sup>39</sup>
  - a) pemeliharaan agama (hifdzud-din)
  - b) pemeliharaan jiwa (hifhzun-nafs)
  - c) pemeliharaan akal (hifhzul-.,aql)
  - d) pemeliharaan keturunan (hifhzun-nasl),
  - e) pemeliharaan harta benda (hifhzul-maal)

ICG merupakan hubungan antar pihak sistem nilai dan berdasarkan nilai mekanisme pengaturan nilai Islam, Pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan agar dapat menggunakan haknya dan Mereka berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat , sematamata karena Allah sifat Rasulullah yaitu:

1. Shiddiq Konsep ICG tercermin didalam Penerapan ICG, shiddiq menggambarkan sikap dalam pengelolaan perusahaan berlandaskan prinsip kebenaran, ketaqwaan, yang berarti memberikan peluang yang setara bagi setiap individu untuk mendapat informasi yang relevan dari perusahaan.
2. Amanah dalam ICG ialah sikap komitmen dalam mengelola perusahaan dan menjalankan tugas, tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya, sebagai bentuk tanggungjawab. Dalam hal ini pula

---

<sup>39</sup> Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, Islamic Business and economic Ethic ( Jakarta : Bumi Aksara, 2012 ) Hlm. 58

pemegang perusahaan harus dapat mengelola aset dengan benar tidak hanya fokus terhadap keuntungan saja tetapi caranya harus sesuai.

3. Fathanah dalam ICG ialah menerapkan prinsip cerdas dalam mengelola usahanya, penerapan tersebut ialah dengan manajerial yang strategis, memaksimalkan anugrah yang diberikan Allah berupa akal, karena dalam bisnis kejujuran saja tidak cukup diperlukan juga kecerdasan spirit.
4. Tabligh Tabligh bermakna sopan santun, Allah menyukai perbuatan yang dilakukan dengan benar dan semataegala mata karena Allah. Dalam penerapan ICG kegiatan manajemen haruslah transparan sehingga dapat dimengerti oleh pihak yang terlibat.
5. Istiqomah bermakna konsisten, dalam penerapannya seorang manager haruslah memegang nilai luhur dalam menjalankan usahanya, misalnya dalam persaingan yang sehat, jujur dan berkomitmen, hal seperti itu bukan hanya dilakukan terhadap perusahaan saja melainkan stakeholder.
6. Qana'ah terhadap pegawai, masyarakat, dan pihak Qanaah bermakna sederhana, efektif dalam hal pekerjaan. Penerapan dalam ICG ialah ketika seseorang dipercaya untuk mengelola dana perusahaan maka diharapkan pengelolaan tersebut haruslah efisien, pengelola dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak penting dan sematamata karena Allah.

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam praktiknya menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dari manajemen perusahaan. Terdapat

berbagai konsep mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi pengungkapan informasi strategis pada *website* perusahaan. Mekanisme tersebut antara lain ukuran Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Manajerial.<sup>40</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, hasil analisisnya menunjukkan bahwa masing-masing mekanisme memiliki hubungan dengan pengungkapan informasi strategis pada *website* perusahaan. Terdapat berbagai konsep perusahaan yang dapat mempengaruhi pengungkapan informasi strategis pada *website* perusahaan. Mekanisme tersebut antara lain ukuran Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Manajerial. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, hasil analisisnya menunjukkan bahwa masing-masing mekanisme memiliki hubungan dengan pengungkapan informasi strategis pada perusahaan. Selanjutnya, struktur dari Tata Kelola Perusahaan juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan keputusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan dan dilakukan dengan baik.<sup>41</sup>

#### 1) Ukuran Dewan Komisaris

Jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris. Dewan komisaris mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan serta memberikan nasihat kepada dewan direksi dan juga memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan Tata Kelola

---

<sup>40</sup> Primastuti, "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis.(2012)"

<sup>41</sup> Primastuti

Perusahaan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 ayat (5) menjelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota Dewan Komisaris di Indonesia bervariasi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia sendiri jumlah Dewan Komisaris paling banyak tiga dan lima orang.<sup>42</sup>

## 2) Komposisi Komisaris Independen



Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris independen diharapkan mampu menempatkan keadilan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang mungkin sering terabaikan, misalnya pemegang saham minoritas serta para *stakeholder* lainnya, sebab komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun yang dapat dianggap sebagai campur tangan untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Rulia Puji Hastanti, Bambang Eka Purnama, and Indah Uly Wardati, "Sistem Penjualan Berbasis Web (E-Commerce) Pada Tata Distro Kabupaten Pacitan," *Jurnal Bianglala Informatika* 3, no. 2 (2015): 1–17.

<sup>43</sup> Rulia Puji Hastanti, Bambang Eka Purnama, and Indah Uly Wardati.

### 3) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi di mana manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh dewan komisaris, dewan direksi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial di mana manajer yang bertugas menjalankan perusahaan sekaligus menjadi pemegang sahamnya tentu akan menyelaraskan kepentingannya. Jika suatu perusahaan memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer jauh lebih peduli tentang kepentingan pemegang saham dan opsi saham akan memiliki insentif untuk kontribusi perusahaan.<sup>44</sup>

## 4. Pengungkapan Informasi

Pengungkapan yaitu membuat sesuatu menjadi diketahui atau mengungkapkan sesuatu. Tingkat pengungkapan sangat dipengaruhi oleh sumber pembiayaan, sistem hukum, keadaan ekonomi dan politik, tingkat perkembangan ekonomi serta tingkat pendidikan dan budaya. Secara umum konsep terkait dengan jawaban atas pertanyaan pengungkapan berapa banyak informasi yang harus diungkapkan. Konsep tersebut antara lain:

- a) Pengungkapan Cukup (*Adequate Disclosure*) merupakan pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan.

---

<sup>44</sup> Sasongko, "Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tingkat Underpricing Penawaran Umum Perdana Saham."

- b) Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*) merupakan pengungkapan yang harus dicapai agar semua pihak mendapatkan informasi yang sama.
- c) Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*) pengungkapan ini menuntut atas penyajian dan pengungkapan secara penuh atas seluruh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan.<sup>45</sup>

Pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. “Pengungkapan (*disclosure*) didefinisikan sebagai penyediaan jumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal dalam pasar modal yang efisien. Pengungkapan, pengertian tersempit pengungkapan, yaitu mencakup hal-hal seperti pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki, dan laporan pelengkap”.<sup>46</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan merupakan suatu penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan maupun media komunikasi pendukung lainnya tentang suatu perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus berguna, lengkap, jelas, menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi, dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi.<sup>47</sup>

Berikut ini tujuan dari pengungkapan dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan

---

<sup>45</sup> Septi Widiawati, “Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting Perusahaan- Perusahaan Yang Terdaftar Pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009- 2011” (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2015).

<sup>46</sup> Septiarsi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Pelaporan Keuangan Melalui Internet Dalam Website Perusahaan.”

<sup>47</sup> Nurbuana Tunjung Ismoyowati, “Pengaruh Indeks Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Dewan Komisaris, Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela Dalam Laporan Tahunan” (Universitas Padjajaran, 2017).

memberikan pengukuran yang relevan atas hal-hal tersebut di luar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan.

- 2) Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan untuk memberikan pengukuran yang bermanfaat bagi hal-hal tersebut.
- 3) Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.
- 4) Untuk memberikan informasi penting yang memungkinkan pengguna laporan keuangan melakukan perbandingan dalam satu tahun dan diantara beberapa tahun.
- 5) Untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk atau arus kas keluar di masa depan.
- 6) Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka.

## 5. Pengungkapan Informasi Strategis

Pengungkapan informasi Strategis perusahaan yang difokuskan pada penelitian ini tergolong dalam pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan.

Adapun jenis-jenis pengungkapan sebagai berikut :

- 1) Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*) ialah pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan mengenai informasi-informasi penting yang menyangkut aktivitas dan kondisi perusahaan secara riil yang bersifat wajib dan diatur dalam peraturan hukum.
- 2) Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*) ialah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan diluar apa yang telah diwajibkan oleh standar

akuntansi atau peraturan badan pengawas.<sup>48</sup>

Keputusan perusahaan untuk mengungkapkan secara sukarela tergantung pada insentif yang akan diperolehnya. Namun biasanya pengungkapan sukarela dilakukan untuk mengurangi informasi yang asimetris dan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Adanya pengungkapan dapat mengindikasikan bahwa perusahaan telah melakukan pertanggungjawaban sosialnya.

Informasi dalam laporan keuangan merupakan sinyal bagi para investor dalam memberikan prospek atau pandangan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan informasi yang disajikan oleh manajemen harus dapat dipercaya, lengkap, dan tepat waktu, sehingga memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan investasi yang tepat. Keputusan tepat yang diambil investor sebelum berinvestasi akan berdampak pada hasil (*feedback*) yang sesuai harapan. Manajemen sebagai agen diberi wewenang oleh pemegang saham (*principal*) untuk mengelola perusahaan. Manajemen perusahaan mempunyai lebih banyak informasi daripada pihak luar mengenai kinerja perusahaan saat ini maupun kinerja masa depan. Padahal, pemegang saham sebagai pihak yang memberikan mandat membutuhkan informasi yang mendetail dan berkala mengenai perusahaan. Manajemen berinisiatif untuk mengungkap informasi perusahaan secara sukarela dalam laporan tahunan.<sup>49</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *voluntary disclosure* sejatinya sangat bermanfaat

---

<sup>48</sup> Kusumawardani, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet (Internet Financial Reporting) Dalam Website Perusahaan."

<sup>49</sup> Kusumawardani.

bagi perusahaan. Karena dengan adanya *voluntary disclosure*, maka nilai perusahaan di mata investor akan meningkat yang tercermin dari harga saham perusahaan tersebut. Harga saham bagi perusahaan mengindikasikan kemudahan perusahaan dalam memperoleh dana di pasar modal. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan salah satu indikator adanya praktek Tata Kelola Perusahaan yang baik. Beberapa aspek internal yang dianggap mempengaruhi keputusan *voluntary*. Pelaporan sukarela merupakan segala jenis pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak diatur dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Perusahaan berhak melakukan pelaporan sukarela dalam rangka memberikan informasi tambahan yang akan mempermudah pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Luas pengungkapan sukarela akan berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan lainnya sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan (Sari, 2013). Penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela bermanfaat bagi perusahaan. Menurut Leftwich et al. (1981) pengungkapan informasi sukarela yang signifikan, baik keuangan maupun non-keuangan, akan menambah nilai dari informasi yang diungkapkan kepada publik. Beaver (1968) menyatakan bahwa sebuah manfaat yang besar bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi sebanyak mungkin sehingga investor mampu membedakan mana perusahaan yang baik dan yang buruk.<sup>50</sup>

Dalam mengungkapkan informasi selain melalui laporan keuangan dapat juga melalui media lain dalam berbagai bentuk, baik yang finansial maupun non finansial. Informasi yang bersifat finansial dapat mengambil bentuk laporan tahunan, prospektus, laporan

---

<sup>50</sup> Wahyuni Wijayanti, "Analisis Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*) Dalam Laporan Tahunan" (UIN Syarif Hidayatullah, 2013).

analisis dan sejenisnya sedangkan yang bersifat non finansial antara lain jumpa pers tentang produk baru, rencana peningkatan kesejahteraan karyawan, dan sebagainya. Semakin luas tingkat pengungkapan informasi keuangan suatu perusahaan, maka menunjukkan semakin valid informasi tersebut.<sup>51</sup>

Terdapat tiga konsep pengungkapan yang biasanya diusulkan yaitu pengungkapan memadai atau cukup (*adequacy*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*). Mengungkapkan informasi adalah salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan perusahaan, karena itu merupakan konsekuensi potensial, serta terdapat keuntungan dan kerugian dari melakukannya. Keuntungannya dapat terkait dengan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan peningkatan image perusahaan, peningkatan kepercayaan investor, likuiditas saham yang lebih besar. Dan kerugian dari pengungkapan informasi yaitu: ancaman pengambilalihan atau *merger*, kemungkinan intervensi oleh lembaga pemerintah dan perpajakan yang berwenang, dan kemungkinan klaim dari karyawan atau serikat pekerja atau dari politik atau kelompok konsumen.<sup>52</sup>

Pengungkapan berkaitan erat dengan praktik Tata Kelola Perusahaan dalam sebuah perusahaan. Hal ini tercermin melalui suatu teori agensi (*agency theory*). Teori agensi berdasarkan literatur empiris menyatakan adanya hubungan substitusi dan pelengkap antara Tata Kelola Perusahaan dan pengungkapan. Selain itu, tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela adalah dua mekanisme kontrol yang digunakan untuk melindungi investor dan mengurangi konflik keagenan.

---

<sup>51</sup> Primastuti, "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis."

<sup>52</sup> Primastuti.

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan publik sebagaimana tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan. Pengungkapan sukarela yang termasuk dalam kategori ini adalah pengungkapan tambahan terkait informasi keuangan perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. kedua pengungkapan sukarela perusahaan ini seringkali diungkapkan dalam bentuk laporan tahunan (*annual report*) walaupun sekarang ini cukup banyak perusahaan yang menerbitkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang terpisah dari laporan tahunan (*annual report*) dalam bentuk laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Dalam ekonomi Islam, akuntabilitas dibutuhkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar dan adil serta transparansi. Menurut Abu-Tapanjeh, akuntabilitas yang utama adalah kepada Allah SWT. Konsep dasar akuntabilitas Islam percaya bahwa seluruh sumber daya yang tersedia untuk individu ada dalam bentuk kepercayaan. Oleh karena itu, pengungkapan fakta keuangan harus berisi informasi yang benar, akurat, dan tersedia bebas untuk pengguna laporan keuangan.

Pengungkapan sukarela sebagai informasi utama yang berasal dari luar laporan keuangan yang tidak secara eksplisit disyaratkan oleh peraturan yang berlaku atau standar akuntansi. Literatur akuntansi tentang pengungkapan sendiri seringkali mengacu pada teori agensi dengan menyediakan dorongan untuk melakukan pengungkapan wajib maupun sukarela terhadap laporan tahunan. Dorongan ini ditunjukkan sebagai alat penggerak yang digunakan untuk mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal menggunakan informasi laporan tahunan untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan yang

bertindak sebagai agen.<sup>53</sup>

Boleh jadi pengaruh atau dampak yang muncul tidaklah membahayakan, namun di sisi lain juga dapat berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi diri kita ataupun orang lain. Sehingga, adanya pengungkapan dari aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan sangatlah penting untuk diketahui guna mengukur sejauh mana kesesuaian terhadap nilai – nilai syariah dan dampak yang dihasilkan dari kegiatan bisnis perusahaan. Pengungkapan informasi ini juga dilakukan manajemen karena:

- a) *Voluntary disclosure* berdampak pada likuiditas saham perusahaan
- b) *Voluntary disclosure* dapat mengurangi cost of capital (biaya modal)
- c) *Voluntary disclosure* berdampak pada biaya transaksi yang lebih rendah dalam perdagangan sekuritas perusahaan.

Berikut Teknik pengukuran informasi strategis:

Informasi Strategis = Jumlah item yang diungkapkan perusahaan / Jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan

Item- item dari indeks pengungkapan tersebut antara lain:

- a) Tujuan, Misi, dan filosofi perusahaan
- b) Aliansi Strategis
- c) Posisi Strategi perusahaan di sector industrinya
- d) Rencana strategi perusahaan (proyek ekspansi pada pasar, produk, dan region lain)
- e) Rencana tahunan perusahaan

---

<sup>53</sup> Muhamad Fauzan Birawanto, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)

- f) Deskripsi dalam konteks persaingan
- g) Informasi risiko (keuangan, komersial, teknis)
- h) Informasi tentang proses produksi.<sup>54</sup>

## 6. Website Perusahaan

*Website* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jaringan internet. Jaringan ini menghubungkan antara pengguna dengan website, sehingga pengguna dapat mengakses *website* tersebut. Pengertian *website* itu sendiri yaitu kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*).<sup>55</sup>

Secara umum *website* mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Fungsi Komunikasi.

Situs web yang mempunyai fungsi komunikasi, pada umumnya situs web bersifat dinamis. Karena dibuat menggunakan pemrograman web (*server side*) maka dilengkapi fasilitas yang memberikan fungsi-fungsi komunikasi, seperti *web mail*, *form contact*, *chatting form*, dan yang lainnya.

b) Fungsi Informasi.

Situs web yang memiliki fungsi informasi, pada umumnya lebih menekankan pada kualitas bagian kontennya, karena tujuan situs tersebut adalah menyampaikan isinya. Situs ini sebaiknya berisi

---

<sup>54</sup> Primastuti, "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis.

<sup>55</sup> Dipo Rizkika Alfaiz, "Pengaruh Karakteristik Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Nonkeuangan Melalui Website Perusahaan Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2016).

teks dan grafik yang dapat di download dengan cepat. Pembatasan penggunaan animasi gambar dan elemen bergerak diyakini sebagai langkah yang tepat, diganti dengan fasilitas yang memberikan fungsi informasi seperti *news*, *profile company*, *library*, *reference*.

c) Fungsi Entertainment.

Situs web juga dapat memiliki fungsi entertainment/hiburan. Bila situs web kita berfungsi sebagai sarana hiburan maka penggunaan animasi gambar dan elemen bergerak dapat meningkatkan mutu presentasi desainnya, meski tetap harus mempertimbangkan kecepatan downloadnya. Beberapa fasilitas yang memberikan fungsi hiburan adalah *game online*, *film online*, *music online*, dan sebagainya

d) Fungsi Transaksi.

Situs web dapat dijadikan sarana transaksi bisnis, baik barang, jasa, atau lainnya. Situs web ini menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Pembayaran bisa menggunakan kartu kredit, transfer, atau dengan membayar secara langsung.<sup>56</sup>

## 7. Perusahaan Jakarta Islamic Index (JII)

Jakarta Islamic Index (JII) adalah index saham syariah yang pertama kali diluncurkan dipasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000 Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Dalam hal ini, indeks JII sebagai saham syariah bergerak dalam bidang halal sesuai prinsip hukum syariah yang bersifat halal. Seperti tidak melakukan kegiatan judi, perdagangan dengan permintaan palsu, juga tidak menggunakan bank berbasis bunga atau

---

<sup>56</sup> Hastanti, Purnama, and Wardati, "Sistem Penjualan Berbasis Web (E-Commerce) Pada Tata Distro Kabupaten Pacitan."

riba. Pada prakteknya dipasar efek, saham syariah terbukti lebih imun ketika pandemi melanda pada awal tahun 2020. Saat itu IHSG dan indeks LQ45 turun hingga masing-masing mencapai -16,76% dan -21,42%. Namun Indeks JII hanya turun sebesar -15,68%.

Apalagi negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Membuat para pengamat yakin bahwa pasar modal syariah akan menarik minat banyak investor, tidak hanya dari kalangan muslim, namun juga dari kalangan lainnya di beberapa tahun ke depan. Ini juga didukung dengan semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa investasi merupakan sebuah kebutuhan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Selain itu, investasi di pasar saham pun tidak hanya terbatas yang konvensional, melainkan ada pula yang syariah dan sudah melewati review ketat seperti saham indeks JII.

## **B. Kerangka Pemikiran**

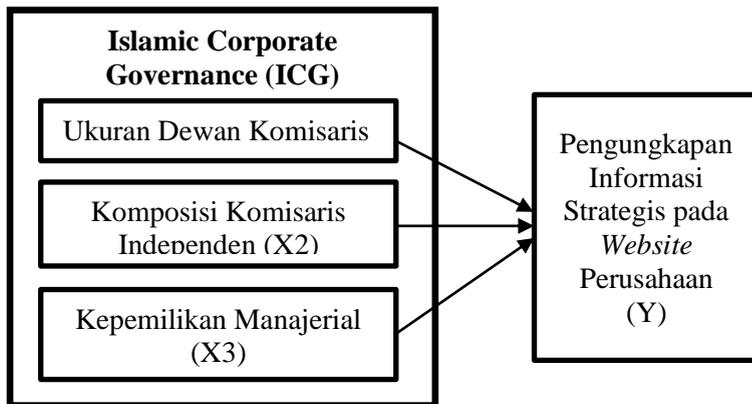
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menggambarkan sebuah kerangka pemikiran sebagai pola dan tahapan dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran atau kerangka penelitian adalah pada umumnya menguraikan landasan yang menjadi kajian penelitiannya, sesuai variabel yang diteliti dilengkapi skema kerangka pemikiran yang menggambarkan keseluruhan variabel penelitian.<sup>57</sup>

Berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>57</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajagrafindo, 2018).

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan:

→ : Secara Parsial

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi Luas Pengungkapan Informasi Strategis pada *Website* Perusahaan (Y), yaitu Ukuran Dewan Komisaris (X1), Komposisi Komisaris Independen (X2) dan Kepemilikan Manajerial (X3).

### C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diteliti. Hipotesis merupakan saran penelitian ilmiah karena hipotesis adalah instrumen kerja dari suatu teori dan bersifat spesifik yang siap diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat menggambarkan skema yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

## 1. Ukuran Dewan Komisaris

Teori *Stakeholder* menyatakan perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dewan komisaris merupakan suatu dewan yang bertugas mengawasi kinerja dewan direksi. Jika semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan manajemen sehingga pengungkapan informasi strategis akan dilakukan.<sup>58</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Gedie E Siagian dan Imam Ghozali membuktikan bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi strategis secara sukarela pada perusahaan.<sup>59</sup>

Berdasarkan *agency theory*, Dewan Komisaris didesain untuk mengurangi konflik antara agen dan prinsipal dalam suatu perusahaan. Hal ini dibutuhkan terutama ketika relevansi informasi akuntansi dipertanyakan. Ukuran suatu Dewan Komisaris pada umumnya dibentuk sesuai dengan kepentingan dan karakteristik perusahaan. Di Indonesia, Bapepam-LK tidak mengatur jumlah tertentu untuk Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi. Namun demikian, Bapepam-LK mensyaratkan jumlah tersebut agar disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dan memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Lipton dan Lorsch (dalam Mizrawati, 2009) menyatakan bahwa ukuran dewan yang optimal adalah tujuh dan sembilan orang.

---

<sup>58</sup> Alberth Makatita, "Dewan Komisaris Dan Pengungkapan Informasi Strategis."

<sup>59</sup> Siagian and Ghozali, "Pengaruh Struktur Dan Aktivitas Good Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Secara Sukarela Pada Website Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia."

Pengaruh ukuran suatu Dewan terhadap efektifitasnya merupakan hal yang kontroversial. Mizrawati (2009) menemukan bahwa keberadaan anggota Dewan dalam jumlah yang banyak akan mengarah pada ketidakefektifan dalam hal pengendalian manajemen, yang kemudian berpotensi menimbulkan masalah keagenan serta menurunkan ketangkasan dan kemampuan Dewan dalam bereaksi.

Firda Amalia dan Herry Laksito dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap luas pengungkapan informasi strategis yang diungkapkan pada *website* perusahaan. Diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi strategis pada perusahaan.<sup>60</sup> Dengan demikian dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan informasi strategis pada *website* perusahaan yang terdaftar di JII.

## 2. Komposisi Komisaris Independen

Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan para pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan. Keberadaan Komisaris Independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Karena komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan

---

<sup>60</sup> Amalia and Laksito, "Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Pada Website Perusahaan. Primastuti,"

informasi yang lebih luas kepada para *stakeholder*-nya.

Semakin besar proporsi komisaris independen maka tingkat pengawasan manajerial akan semakin efektif dan kemudian perusahaan lebih banyak melakukan pengungkapan. Konsep ini sesuai dengan *agency theory* yang menyatakan bahwa *External Directors* merupakan pengawas tertinggi dan akan mempertahankan independensinya ketika berhadapan dengan manajemen, sehingga semakin tingginya pengawasan terhadap pihak manajemen menunjukkan bahwa komisaris independen secara statistik berhubungan dengan tingkat pengungkapan sukarela.<sup>61</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sinung Primastuti Pengaruh *Corporate Governance* Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis pada *website* perusahaan. Diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Komposisi Komisaris Independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap luas pengungkapan informasi strategis pada *website* perusahaan.<sup>62</sup> Dengan demikian dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H2: Komposisi Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan informasi strategis pada *website* perusahaan yang terdaftar di JII.

---

<sup>61</sup> Sinung Primastuti, "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 1-15"

<sup>62</sup> Sinung Primastuti.

### 3. Kepemilikan Manajerial

Dalam pendekatan *agency theory* kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham dengan jumlah yang substansial. Jumlah saham yang substansial yaitu sebesar 5% atau lebih dari jumlah saham beredar (Bapepam, 2006). Keadaan ini memungkinkan sekali terjadinya masalah keagenan. Oleh karena itu, sebagai salah satu jalan untuk mengurangi risiko tersebut, pemegang saham substansial akan memiliki kekuasaan dan insentif yang lebih besar dalam memonitor manajemen, sehingga akan menuntut pengungkapan informasi yang lebih besar pula.<sup>63</sup>

Struktur kepemilikan manajerial dijadikan sebagai sebuah instrumen atau alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial merupakan suatu bentuk mekanisme insentif yang diberikan perusahaan kepada manajer untuk mendorong manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan *shareholders*, bukan bertindak untuk kepentingan pribadi. Adanya kepemilikan saham manajerial membuat kedudukan antara pemegang saham dan manajer dapat disejajarkan, sehingga secara tidak langsung manajer berkerja juga demi kepentingan pemegang sahamnya.<sup>64</sup> Jika suatu perusahaan memiliki kepemilikan manajerial yang kecil, manajer jauh lebih peduli tentang kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, struktur modal dengan kepemilikan manajerial kecil menurunkan biaya keagenan dan meningkatkan pengungkapan informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Anggria Aprilianingrum membuktikan bahwa

---

<sup>63</sup> Sinung Primastusti.

<sup>64</sup> Sasongko, "Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tingkat Underpricing Penawaran Umum Perdana Saham."

Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela melalui *website* perusahaan.<sup>65</sup> Dengan demikian dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan Informasi Strategis pada *website* perusahaan yang terdaftar di JII.



---

<sup>65</sup> Aprilianingrum, “Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadapluas Pengungkapan Sukarelamelalui Website Perusahaan.”

## BAB V KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara Parsial Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan Informasi Strategis pada *website* perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2023. Hal ini berarti bahwa sedikit atau banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak memengaruhi luas pengungkapan informasi strategis pada perusahaan karena kebijakan pengungkapan informasi strstegis merupakan langkah strategis dari manajemen bukan dari dewan komisaris, dan dewan komisaris tidak terlibat langsung terhadap kebijakan tersebut. Maka ini terjadi karena beberapa alasan dewan komisaris belum melaksanakan tugasnya secara maksimal yaitu disebabkan karena efektivitas pengawasan dewan komisaris tidak hanya ditentukan dari kuantitas jumlah dewan tersebut, tetapi lebih ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti kualitas dewan komisaris, nilai, norma, dan kepercayaan dalam organisasi. Hal ini tidak sejalan dengan *teori stakeholder* karena dewan komisaris belum melaksanakan tugasnya secara baik, Perusahaan diharapkan dapat mementingkan kepentingan *stakeholder* agar tidak terjadi konflik dalam perusahaan.
2. Secara Persial Komposisi Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan Informasi Strategis pada *website* perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen yang besar justru akan kurang efektif bagi perusahaan, dikarenakan peningkatan jumlah anggota dewan komisaris independen akan semakin sulit mendapatkan kesepakatan dalam

penentuan pengawasan. Persetujuan semua anggota dewan komisaris independen yang jumlahnya lebih banyak akan semakin sulit terlaksana karena adanya keanekaragaman pendapat sehingga dewan komisaris independen justru kurang mampu menekan kebijakan direksi untuk mengungkapkan informasi sukarela yang lebih luas. Hal tersebut tidak sejalan dengan *theory agency* hubungan yang terjadi antara manajemen (agen) dengan pemilik perusahaan (*prinsipal*), prinsipal mendelegasikan wewenangnya kepada agen untuk mengelola perusahaan

3. Secara persial Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan Informasi Strategis pada *website* perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2023. Artinya meningkat atau menurunnya saham yang dimiliki manajer tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi setrategi hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu rata-rata kepemilikan jumlah saham manajerial pada perusahaan relative yang menyebabkan belum terdapat keselarasan kepentingan antara agen dan prinsipal. selain itu kepemilikan manajerial yang relative kecil tersebut, manajer tidak mempunyai kendali terhadap perusahaan. pemilik mayoritas lebih banyak mengendalikan perusahaan dan manajer hanya dianggap sebagai “ tangan” dari pemilik mayoritas, itu sebabnya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan informasi setrstegi pada *website* perusahaan.
4. Prinsip keadilan dalam Akuntansi ini jika dilakukan dengan baik maka akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Akuntansi merupakan suatu bentuk pencatatan yang ditujukan untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai informasi keadaan keuangan maka, hal inilah yang dianjurkan islam agar mencatat setiap transaksi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan diharapkan meningkatkan jumlah anggota dewan komisaris dan komposisi komisaris independent agar pengungkapan informasi dapat dilakukan. Karena melihat dari hasil analisis data penelitian ditemukan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris dan komposisi komisaris independen yang besar akan melakukan pengungkapan informasi strategis, sedangkan perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris dan komposisi komisaris independen yang kecil diharapkan untuk meningkatkan jumlah anggota dewan komisarisnya. Sehingga semakin banyak anggota dewan komisaris dan komposisi komisaris independent yang di miliki perusahaan maka pengungkapan informasi strategis akan lebih mudah dan efektif dilakukan.
2. Dan dari hasil analisis data yang dilakukan peneliti juga ditemukan bahwa semakin kecil kepemilikan saham oleh manajemen pada suatu perusahaan maka pengungkapan informasi strategis akan tinggi dilakukan oleh pihak perusahaan. Dengan kepemilikan saham yang kecil oleh manajemen, maka tidak akan terjadi masalah Keagenan (*Agency Teori*) dalam perusahaan, sehingga bagi perusahaan diharapkan untuk mengurangi kepemilikan saham oleh manajemen.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel *Islamic corvorate governance* perusahaan seperti, kharakteristik perusahaan atau variabel lainnya yang masih belum terakomodasi dalam penelitian ini seperti jumlah komite audit, rapat komite audit maupun kualitas audit, bisa membuktikan sesuai dengan studi lapangan. Penelitian pun bisa diubah ke *good government* untuk penelitian terbaru seperti tata kelola pemerintahan yang ada di privinsi, kabupaten, atau daerah.

## DAFTAR PUATAKA

- Adnyana, I Made, and Putu Ruth Adwishanti. "Good Corporate Governance, Ukuran Dewan Komisaris, Net Profit Margindan Ukuran Perusahaan Efeknya Terhadap Pengungkapan Risiko." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2020): 234–59.
- Aini, Pratiwi Nurul, and Muchamad Syafruddin. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Sukarela Dengan Efektivitas Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi." *Diponegoro Journal Of Accounting* 4, no. 2 (2015): 1–8.
- Alberth Makatita, "Dewan Komisaris Dan Pengungkapan Informasi Strategis."
- Alfaiz, Dipo Rizkika. "Pengaruh Karakteristik Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Nonkeuangan Melalui Website Perusahaan Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2016.
- alfiana. "Analisis Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Amalia, Firda, and Herry Laksito. "Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Pada Website Perusahaan." *Diponegoro Journal of Accounting* 2, no. 1 (2013): 1–11.
- Aprilianingrum, Anggria. "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarelamelalui Website niversitas Surabaya, 2016.
- Asrori. "Implementasi Islamic Corporate Governance Dan Implikasi Terhadap Kinerja Bank Syariah." *Jurnal Dinamika Akuntansi* 06,01 (2014): 90–102.
- Diyan Pratiwi dan Lilik Andriani, "Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan informasi stategis (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah

- Yang Terdaftar Dalam Ojk Tahun 2014-2018).
- Evy Roslita dan Arsyad Daud,” Pengaruh Kepemilikan Saham, Profitabilitas, Leverage Dan Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi.” *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 22 No. 2 / 2019.
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajagrafindo, 2018).
- Fitri, Alfiana. “Analisis Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan.” *Jurnal Akrua* 7, no. 2 (2013): 120–65.
- Ghonyah, N., & Hartono, S. (2014). The Role of Islamic Corporate Governance in SMEs to Improve the Welfare of Society. *International Journal of Economic Research*, 11(3).
- Hadyan, “Pengaruh Laba Akuntansi, Komponen arus kas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode Tahun 2015-2019”
- Hadyarti, Vidi, and Tubagus M. Mahsin. “Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Good Corporate Governance (Gcg) Sebagai Indikator Dalam Menilai Nilai Perusahaan.” *Kompetensi* 13, no. 1 (2019): 17–33.
- Heti Herawati,” *Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Informasi Strategis.*” *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* Vol. 2, No. 2, Desember 2015, hal203 – 217.
- Hidayanti, Ery, and Sunyoto. “Pentingnya Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan Dalam Meminimalisasi Asimetri Informasi.” *Jurnal WIGA* 2, no. 2 (2012): 19–28.
- Hisamuddin, Nur, and M. Yayang Tirta K. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.” *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 10, no. 2 (2019): 109–38.
- Hisamuddin, Nur, and M. Yayang Tirta K. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.” *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 10, no. 2 (2019): 109–38.
- Ismoyowati, Nurbuana Tunjung. “Pengaruh Indeks Corporate

- Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Dewan Komisaris, Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela Dalam Laporan Tahunan.” Universitas Padjajaran, 2017.
- Josephus Alberth Makatita, Dewan Komisaris dan Pengungkapan Informasi Strategis, Volume IX, Nomor 2, Oktober 2015.
- Kartika Rini, Amalia. “Analisis Luas Pengungkapan Corporate Governance Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik Di Indonesia.” Universitas Diponegoro Semarang, 2016.
- Kebudayaan Nasional, Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Khusnawati, S. (2017). Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja dan Reputasi perbankan Syariah.
- Kusumawardani, Arum. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet (Internet Financial Reporting) Dalam Website Perusahaan.” Universitas Semarang, 2018.
- Krisnauli, “Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agency Cost (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)” (Universitas Semarang, 2014).
- Muhamad Fauzan Birawanto, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017).
- Nainggolan, Arison. “Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI.” *Jurnal Universitas Methodist Indonesia* 1, no. 1 (2019): 1–11.
- Nurbuana Tunjung Ismoyowati, “Pengaruh Indeks Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Dewan Komisaris, Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela Dalam Laporan Tahunan” (Universitas Padjajaran, 2017).
- Rahma, Y. (2018). Islamic corporate governance and Islamic social responsibility towards Maqashid Shariah. *KnE Social Sciences*,

70-87.

- Ratih Kusumawardhani, Pengaruh luas pengungkapan informasi, konsentrasi kepemilikan dan diversifikasi pada biaya modal ekuitas: studi pada perusahaan non- keuangan di Indonesia, *Jurnal Siasat Bisnis* Vol.22 No. 2, 2018, 182-202.
- Riadi Edi, *Statistika Penelitian Analisis Manual Dan IBM SPSS* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016).
- Rulia Puji Hastanti, Bambang Eka Purnama, and Indah Uly Wardati, "Sistem Penjualan Berbasis Web (E-Commerce) Pada Tata Distro Kabupaten Pacitan," *Jurnal Bianglala Informatika* 3, no. 2 (2015): 1-17.
- Sasongko, "Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tingkat Underpricing Penawaran Umum Perdana Saham." Septiarsi, Nora Marina. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Pelaporan Keuangan Melalui Internet Dalam Website Perusahaan." Universitas Diponegoro, 2016.
- Septi Widiawati, "Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting Perusahaan- Perusahaan Yang Terdaftar Pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009- 2011" (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2015).
- Siagian and Ghozhali, "Pengaruh Struktur Dan Aktivitas Good Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Secara Sukarela Pada Website Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia."
- Sinung Primastuti. "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21, no. 2 (2019): 195-204.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Cv Alfabeta, 2015).
- Yudika Amanda Putra Silaban, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing," *JOM FEKON* Vol.2 No. 1 Februari 2015.